

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam dunia usaha maupun instansi publik. Di Indonesia laporan keuangan dikaji untuk memenuhi tuntutan terhadap lembaga publik yang semakin menguat baik pusat maupun daerah. Laporan keuangan memiliki peran memberikan informasi penting bagi posisi keuangan dalam hasil kerja yang dilakukan. Firdaus Dkk (2015) Laporan keuangan pemerintah daerah menggambarkan keluaran atau hasil kegiatan yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur sehingga dapat menjelaskan kinerja dan tanggung jawab pengelola keuangan. Dalam hal ini pemerintah daerah berperan menyajikan dan melaporkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemakainya (Aprianyah Dkk, 2020). Pentingnya laporan keuangan pemerintah daerah adalah membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, sebab di dalam penyusunan laporan keuangan memiliki tujuan memepertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada masyarakat (Fidyasari dan Suryono, 2021).

Ikyarti dan Aprilia (2019) menyatakan laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila dapat memberikan informasi yang mudah dipahami, bermanfaat, bebas dari kesalahan yang material, serta bisa diandalkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam informasi akuntansi guna mencapai tujuan. Laporan keuangan yang berkualitas dapat membantu kewajiban pemerintah terutama

dalam pengambilan keputusan dalam hal sosial, ekonomi, dan politik (Alamsyah dkk, 2015).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Tawaqal dan Suparno (2017) faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian tersebut didukung oleh Agustina dkk (2020) menyatakan faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah antara lain pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia.

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah menyatakan sistem pengendalian internal terdiri atas berbagai kebijakan yang terkait dengan catatan keuangan, memberikan keyakinan yang kuat bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku dan memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan asset yang terdampak material pada laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah daerah yang memadai dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang baik. (Tawaqal dan Suparno, 2017). Sistem pengendalian yang diterapkan dalam pemerintah berguna untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah bisa terlaksana secara baik dan berkualitas. Hal ini didukung oleh penelitian Faishol (2016) bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu hal lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan

adalah pemanfaatan teknologi informasi. Era globalisasi seperti sekarang ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi yang tangguh dan memiliki keunggulan yang kompetitif ditengah persaingan yang semakin ketat (Modo dkk, 2016). Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan terhadap pelaporan keuangan (Khoirunisa, 2019). Optimalnya pemanfaatan teknologi dapat membangun jaringan manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pekerjaan terolah secara lebih sederhana dan cepat (Haza, 2015). Namun, jika pemanfaatan teknologi belum terlaksana secara optimal maka akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat mengakibatkan pelaporan keuangan yang tidak tepat waktu, dan menyulitkan sumber daya dalam melakukan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu instansi diharuskan untuk beralih pada sistem komputer dan meninggalkan sistem manual dalam melaksanakan pekerjaan.

Menurut Tampubolon dan Basid (2019) pemerintah daerah memiliki tugas untuk mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah serta mendapatkan informasi yang akurat dan menghindari penyalahgunaan informasi keuangan yang terjadi. Manfaat lain yang diberikan oleh pemanfaatan teknologi adalah cepatnya pemrosesan informasi dan membantu dalam proses penyajian laporan keuangan (Zubaidi, dkk 2019).

Faktor lain yang mendukung dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan Menurut (Irafah dkk, 2020) adalah kompetensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kompeten sangat dibutuhkan untuk

menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif. Pemerintah daerah harus memiliki sumber daya yang berkompeten, memiliki latar pendidikan akuntansi ataupun memiliki kemampuan dalam bidang keuangan sehingga dalam pengelolaan keuangan dapat menerapkan sistem akuntansi dengan baik (Khoirunisa, 2019). Tawaqal dan Suparno (2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami serta menerapkan logika akuntansi sangat berdampak terhadap baik buruknya kualitas laporan keuangan. Faktanya, dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas banyak ditemukannya kendala yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang kurang memadai.

Menurut fakta yang bersumber dari website resmi Kabupaten Ponorogo, Ponorogo merupakan salah satu daerah yang memiliki tata pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini di landasi oleh pencapaian prestasi wajar tanpa pengecualian secara 8 kali berturut turut. Pencapaian tersebut dapat diraih salah satunya berkat sistem pengendalian internal yang sudah diterapkan dengan baik. Kondisi ini menggambarkan bahwa Kabupaten Ponorogo sudah baik dalam mengelola laporan keuangan pemerintah daerah pada bidang administrasi dan sudah terprosedur (jatimnow.com). hal ini bisa menjadi pemicu atau motivasi kerja pemerintahan Kabupaten Ponorogo untuk terus maju ke arah yang lebih baik lagi dan lebih sejahtera. Wilayah yang berhasil mendapatkan opini Prestasi wajar tanpa pengecualian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Terlepas dari itu semua, sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 10 menyatakan bahwa laporan

keuangan disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pertanggung jawaban yang akan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) sendiri merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi urusan penunjang pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan, dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati (Bppkad.go.id).

Dalam penelitian ini penulis tertarik mengambil kualitas laporan keuangan sebagai variabel penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya Mutiana Dkk (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian intern, teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan (studi pada satker di lingkungan kementerian agama abupaten aceh utara). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa secara simultan sistem pengendalian intern, teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satker di lingkungan kementerian agama kabupaten aceh utara. Penelitian lain yang dilakukan oleh Suryaningsih (2019) membuktikan secara parsial dan simultan kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Tampubolon dan Basid (2019) menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Suryaningsih (2019) . Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang diatas serta pendapat dalam penelitian terdahulu maka penulis tertarik memilih judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi, Dan Kompetensi sumber daya manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada judul peneltian dan juga latar belakang masalah yang telah dibahas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh teradap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten ponorogo?
2. Apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten ponorogo?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten ponorogo?
4. Apakah sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten ponorogo?

1.3 Tujuan Dan Mafaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Ponorogo.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan pemerintah daerah Ponorogo.
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya mnausia terhadap kualitas laporan pemerintah daerah Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini data menambahkan pengetahuan serta sebagai acuan referensi bagi peneliti selanjutnya dan pengembangan ilmu akuntansi dibidang sector publik, khususnya untuk memahami hubungan antara sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah.

2. Bagi Kabupaten Ponorogo

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki kinerja

pemerintah sehingga mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang transparan dan akuntabel khususnya di Kabupaten Ponorogo.

3. Bagi BPPKAD

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengevaluasi kinerja badan pendapatan pengelolaan keuangan asset daerah dalam menunjang tata pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Ponorogo.

4. Peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan literature serta tambahan wawasan untuk menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya.

